



APA ITU PILKADA LANGSUNG DAN PILKADA TIDAK LANGSUNG ?

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung: kita memilih kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) secara langsung melalui pemilihan umum. Kita dapat melihat, menilai, dan memilih siapa yang layak menjadi pemimpin daerah kita.

Pilkada tidak langsung: pemilihan kepala daerah akan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya kita tidak dapat memilih kepala daerah. Karena hak pilih kita dicabut sehingga kita tidak tahu latar belakang dari calon pemimpin daerah kita nantinya.

APA DAMPAK UNDANG-UNDANG PILKADA KEPADA KITA ?

Undang-Undang Pilkada saat ini mengganti pilkada langsung menjadi tidak langsung. Hal ini membuat kita tidak bisa memilih kepala daerah lagi, dan hak pilih kita dialihkan kepada DPRD. Artinya kepala daerah ini akan dipilih tergantung dari kepentingan politik DPRD, bukan kita (rakyatnya). Oleh karena itu, dalam pemerintahan daerah kedepannya, seluruh peraturan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah daerah akan lebih berpihak pada DPRD dan "kalangannya". Dengan kata lain, undang-undang ini dibuat untuk kepentingan elit yang ingin berkuasa bukan untuk kepentingan rakyat dan justru dapat dijadikan alat menindas rakyat.

MENGAPA PILKADA LANGSUNG ITU PENTING ?

Pilkada langsung jelas penting karena akan menentukan bagaimana kepala daerah kita terpilih. Dengan terpilihnya kepala daerah yang tepat, maka nasib dan daerah kita pun akan terjamin dengan baik. Ada beberapa keuntungan dari pilkada langsung:

1. Lebih bebas memilih kepala daerah kita;
2. Jarak antara kepala daerah dengan kita lebih dekat;
3. Program yang diusung kepala daerah berdasarkan kebutuhan kita, bukan DPRD;
4. Kesempatan "sogok menyogok" dan "penyelewengan kekuasaan" semakin kecil;
5. Akses terhadap kerja pemerintahan daerah akan lebih terbuka kepada publik, karena pemerintah daerah merasa bertanggung jawab kepada kita, sebagai pihak yang telah memilih mereka. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akses ini akan lebih beralih kepada DPRD;
6. Mendorong partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada kita;
7. Lebih menjaga stabilitas pemerintah daerah karena kepala daerah mendapatkan legitimasi publik.

APA YANG BISA KITA LAKUKAN ?

Perlu dicatat, Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden SBY tidak menjadi jaminan hak suara kita kembali. Ini karena Perppu tersebut kemungkinan besar tidak akan disahkan oleh DPR RI. Namun ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk merebut kembali hak suara kita, misalnya:

1. Melakukan aksi protes ke Gedung DPR. Kita tunjukkan kepada DPR dan elit-elit politik siapakah pemilik Negara ini yang sebenarnya.
2. Membuat kampanye, berupa foto, tulisan, video dan disebar melalui internet.

Dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan. Kami yakin kamu bisa melakukannya untuk daerah mu menjadi lebih baik.

**GERAKAN
RAKYAT
BERDAULAT**

AYO KITA KEPUNG DPR RI

14 Oktober 2014

Jam: 13.00 - SELESAI

TITIK KUMPUL: GERBANG DPR RI